



Profil Gender

KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BOMBANA**



TIM PENYUSUN
BUKU PROFIL GENDER KABUPATEN BOMBANA

Pengarah	:	Sekretaris Daerah
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana
Koordinator	:	Sumiyarti, S.Sos.,M.M
Pengolah Data	:	1. Sumiyarti, S.Sos.,M.M 2. Chaerudin, S.Si 3. Indrawati, SH 4. Khairiah Amin, S.Si
Editor	:	1. Samsul Bahri, SE.,MM 2. Hukmun Mustamilah M, SKM.,M.Kes
Layout dan Finishing	:	Chaerudin, S.Si
Penerbit	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya Profil Gender Kabupaten Bombana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Bombana dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi gender di Kabupaten Bombana Tahun 2025. Dalam buku ini disajikan profil Gender diberbagai bidang pembangunan. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bombana.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan Profil Gender ini. Ucapan terima kasih tersebut penulis tujukan kepada:

1. Pemerintah Kabupaten Bombana yang telah memberikan kesempatan dan Apresiasi untuk menulis Profil Gender Kabupaten Bombana;
2. Bpk. Drs. Abdul Rahman, M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana;
3. Para Kepala Perangkat Daerah yang telah membantu memberikan data dan Informasi Gender dan Anak;
4. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang banyak memberikan saran dan masukan sehingga Profil Gender dapat disusun dengan baik;
5. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah terlibat banyak membantu dalam penyusunan Profil Gender ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan profil gender ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan pemerhati sangat diharapkan untuk penyempurnaan Profil Gender ini.

Bombana, 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bombana

Drs. Abdul Rahman, M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Sumber Data	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM	5
2.1 Letak Geografis	5
2.2 Luas Wilayah Kabupaten Bombana.....	6
BAB III KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.....	8
3.1 Kependudukan	8
3.2 Keluarga Berencana.....	12
BAB IV KETENAGAKERJAAN DAN EKONOMI	16
4.1 Ketenaga Kerjaan	16
4.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka ...	17
4.1.2 Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin.....	19
4.1.3 Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas yang bekerja seminggu yang lalu menurut Pekerjaa Utama dan Jenis Kelamin	21
4.1.4 Pencari Kerja menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin	23
4.2 Ekonomi	25

BAB V POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	28
5.1 Politik	28
5.1.1 Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	29
5.1.2 Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif	32
BAB VI KESEHATAN	41
6.1 Kesehatan	41
6.1.1 Angka Kematian Ibu	42
6.1.2 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44
BAB VII PENDIDIKAN	46
7.1 Pendidikan	46
7.1.1 Angka Partisipasi Sekolah	48
7.1.2 Angka Partisipasi Kasar	49
7.1.3 Angka Partisipasi Murni	50
7.1.4 Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi	53
BAB VIII KEKERASAN PADA PEREMPUAN.....	55
8.1 Kekerasan Terhadap Perempuan	55
BAB IX PENUTUP	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bombana menurut Kecamatan se Kabupaten Bombana.....	9
2. Tabel 3.1.2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok umur dan Jenis Kelamin,2024	10
3. Tabel 3.2 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta aktif KB menurut Kecamatan dan Jenis KB di Kabupaten Bombana.....	13
4. Tabel 4.1.1 Jumlah Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di Kabupaten Bombana,2024	18
5. Tabel 4.1.2 Jumlah Penduduk berumur 15 tahu keatas yang bekerja menurut Lapangan usaha dan jenis kelamin di Kabupaten Bombana Tahun 2024	20
6. Tabel 4.1.3 Jumlah Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut Pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Bombana Tahun 2024	22
7. Tabel 4.1.4 Jumlah Pencari Kerja menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bombana Tahun 2024	24
8. Tabel 4.2.1 Jumlah Koperasi Aktif, Koperasi Tidak Aktif di Kabupaten Bombana Tahun 2024	26
9. Tabel 5.1.1 Komposisi Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana Tahun 2024	30
10. Tabel 5.1.1.1 Komposisi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin	31
11. Tabel 5.1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Bombana Berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	32
12. Tabel 5.1.2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bombana Tahun 2024	34
13. Tabel 5.1.2.2 Jumlah Pegawai dengan Perjanjian Kerja menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bombana Tahun 2024	35
14. Tabel 5.1.2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024	37
15. Tabel 5.1.2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Vertikal Bombana berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 3034.....	38
16. Tabel 6.1.1 Jumlah Kematian Ibu menurut tingkat Kecamatan di Kabupaten Bombana Tahun 2024.....	43

17. Tabel 6.1.2 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1/K4, KEK, dan Pemberian Zat Besi Di Kabupaten Bombana Tahun 2020-2024	45
18. Tabel 7.1.1 Presentase Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bombana Tahun 2024	48
19. Tabel 7.1.2 Jumlah Angka Partisipasi Kasar Penduduk Kabupaten Bombana Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tahun 2024.....	50
20. Tabel 7.1.3 Jumlah Angka Partisipasi Murni menurut jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	51
21. Tabel 7.1.4 Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Bombana	52
22. Tabel 8.1 Jumlah Korban kekerasan pada perempuan berdasarkan kasus Dan jenis kelamin di Kabupaten Bombana Tahun 2024.....	57
23. Tabel 8.1.1 Jumlah Korban dan Pelaku yang berhadapan hukum di Kabupaten Bombana Tahun 2024.....	60
24. Tabel 8.1.1.2 Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut tempat Kejadian per Kecamatan di Kabupaten Bombana Tahun 2024	61
25. Tabel 8.1.1.3 Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan menurut jenis Pelayanan di berikan per kecamatan di Kabupaten Bombana Tahun 2024	62
26. Tabel 8.1.1.4 Jumlah Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut pekerjaan Per Kecamatan di Kabupaten Bombana Tahun 2024.....	63

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Gambar Peta Wilayah Kabupaten Bombana.....	6
2. Gambar 2.2 Gambar Luas Wilayah Kabupaten Bombana	7
3. Gambar 3.1.1 Struktur Penduduk Kabupaten Bombana	33
4. Gambar 8.1 Jumlah Korban kekerasan pada perempuan berdasarkan kasus dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bombana Tahun 2024	58
5. Gambar 8.2 Jumlah Korban dan Pelaku Kekerasan pada Perempuan berdasarkan Kasus di Kabupaten Bombana.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Komitmen Nasional terkait peningkatan kualitas perempuan terlihat pada visi Presiden Prabowo –Gibran pada Point 4 memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas dan pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2025-2029, Salah satu prioritasnya adalah meningkatkan Sumber daya manusia ini diantaranya peningkatan kualitas perempuan. hal tersebut telah ditetapkan menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Perempuan diarahkan memiliki akses, partisipasi, control dan manfaat yang setara dengan laki-laki didalam pembangunan.

Terbatasnya ketersediaan data gender menimbulkan kesulitan dalam pengukuran kesenjangan pencapaian pembangunan, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,12 persen, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,486. IPM merupakan ukuran kualitas hidup berbasis pada kapabilitas dasar penduduk yang diperluas. Sedangkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Permasalahan ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu masih banyaknya peraturan perundang - undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender serta kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin. Hal ini berarti ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan merupakan masalah yang masih dihadapi di masa mendatang.

Menindaklanjuti persoalan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai upaya memfasilitasi dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ketersediaan data gender menurut jenis kelamin di daerahnya melalui Permen Nomor 4 Tahun 2023 tentang satu Data Gender dan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi acuan pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah secara terpadu sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan "***Profil Gender Kabupaten Bombana Tahun 2025***". untuk mempresentasikan capaian pembangunan Kabupaten Bombana yang berbasis data terpilah sehingga dapat menjadi informasi dalam monitoring, evaluasi dan proses perencanaan pembangunan daerah yang akan datang. Dengan maksud tersebut maka tujuan penyusunan buku ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran atau informasi tentang realita data gender disetiap aspek pembangunan khususnya dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenaga kerjaan, politik, dan sosial budaya;
2. Untuk mengidentifikasi masalah dan isu kesenjangan gender yang terjadi pada pembangunan daerah;
3. Untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bombana dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan yang reseponsif bagi perempuan di masa mendatang dengan berbasis pada temuan dalam profil gender tahun 2025 ini.

1.3 Sumber data

Sumber Data dalam penyusunan "***Profil Gender Kabupaten Bombana Tahun 2025***". Adalah Data yang digunakan dalam profil ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data hasil Bombana Dalam Angka Tahun 2025, selain itu publikasi ini juga menggunakan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), dan dari berbagai perangkat daerah Kabupaten Bombana.

Sejumlah data yang diperoleh kemudian dipilah berdasarkan kategorisasi dan ditampilkan dalam bentuk tabulasi dan atau grafik untuk lebih mudah dipahami oleh pembaca. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya disusun berdasarkan kebutuhan dalam penyusunan profil Gender Kabupaten Bombana Tahun 2025. Metode yang

digunakan adalah analisis kuantitatif yang mengacu pada analisis gender dengan memperhatikan aspek komposisi data terpilah laki-laki dan perempuan.

1.4. Sistematika Penulisan

Buku Profil Gender Kabupaten Bombana Tahun 2024 ini, disusun dengan sistematika yang terdiri dari 8 Bab yaitu:

- Bab 1 : Memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sumber Data serta Sistematika Penulisan
- Bab 2 : Memuat tentang Gambaran Umum Kabupaten Bombana
- Bab 3 : Memuat tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana
- Bab 4 : Memuat tentang Ketenagakerjaan dan Ekonomi
- Bab 5 : Memuat tentang Politik dan Pengambilan Keputusan
- Bab 6 : Memuat Kesehatan
- Bab 7 : Memuat tentang Pendidikan
- Bab 8 : Memuat tentang Kekerasan terhadap Perempuan
- Bab 9 : Memuat tentang Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM

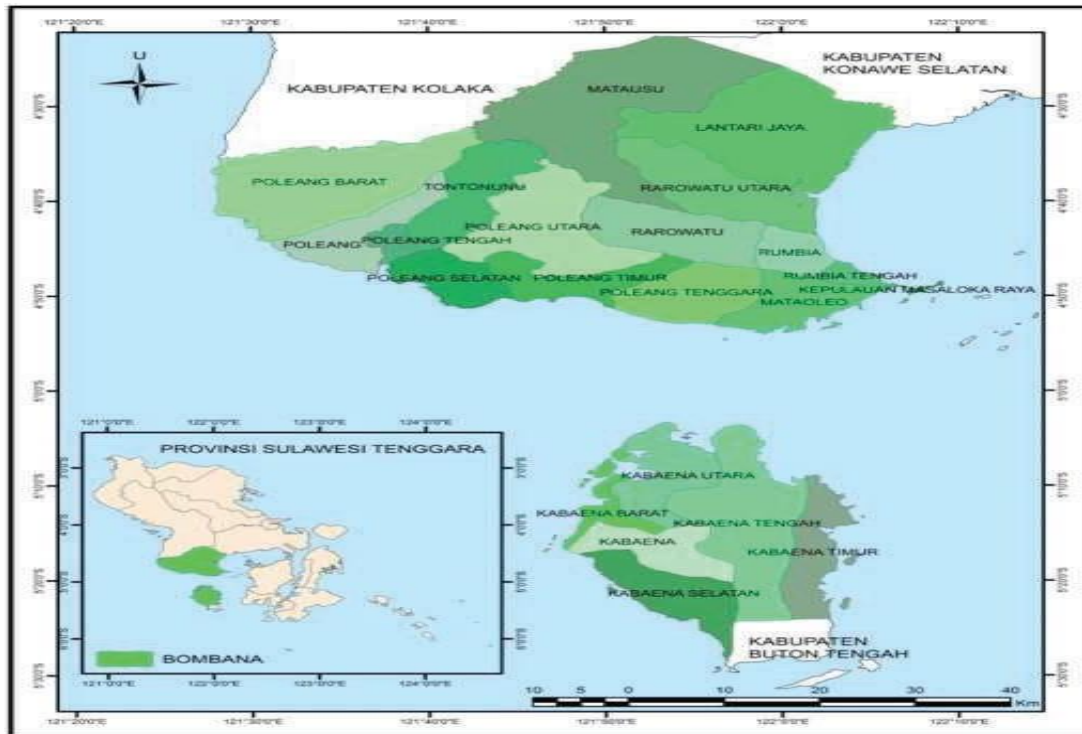
2.1 Letak Geografis

Kabupaten Bombana adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di kepulauan Jazirah Tenggara pulau Sulawesi. Apabila ditinjau dari peta Kabupaten Bombana, secara geografis terletak dibagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara $4^{\circ}22' 59,4''$ – $5^{\circ}28' 26,7''$ Lintang Selatan (sepanjang ± 180 km) dan membentang dari Barat ke Timur diantara $121^{\circ}27' 46,7''$ - $122^{\circ}09' 9,4''$ Bujur Timur (sepanjang ± 154 km).

Wilayah Kabupaten Bombana disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Konawe Selatan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton Tengah, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Tengah, serta sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone.

Kabupaten Bombana memiliki luas Daerah daratan seluas $\pm 3.293,97$ km² atau 329.397 ha, dimana daerah perairan laut diperkirakan seluas $\pm 11.837,31$ km². Saat ini, Kabupaten Bombana terdiri dari 22 wilayah Kecamatan. Kecamatan yang terdapat di pulau Sulawesi yaitu : Kecamatan Rumbia, Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantari Jaya, Kecamatan Matausu, Kecamatan Poleang Timur, Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Poleang Selatan, Kecamatan Poleang Tenggara, Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Barat, Kecamatan Tontonunu, Kecamatan Poleang Tengah. Kecamatan yang terdapat di kepulauan yaitu : Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kecamatan Kabaena, Kecamatan Kabaena Utara, Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Kabaena Barat, Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena Tengah. Kecamatan yang paling luas daerahnya adalah Kecamatan Lantari Jaya dengan luas 388,81 km² atau 11,80 persen

terhadap total luas daerah Kabupaten Bombana. Sedangkan Kecamatan yang paling kecil daerahnya adalah Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya dengan luas hanya 2,81 km^2 atau 0,09 persen dari total luas Kabupaten Bombana.



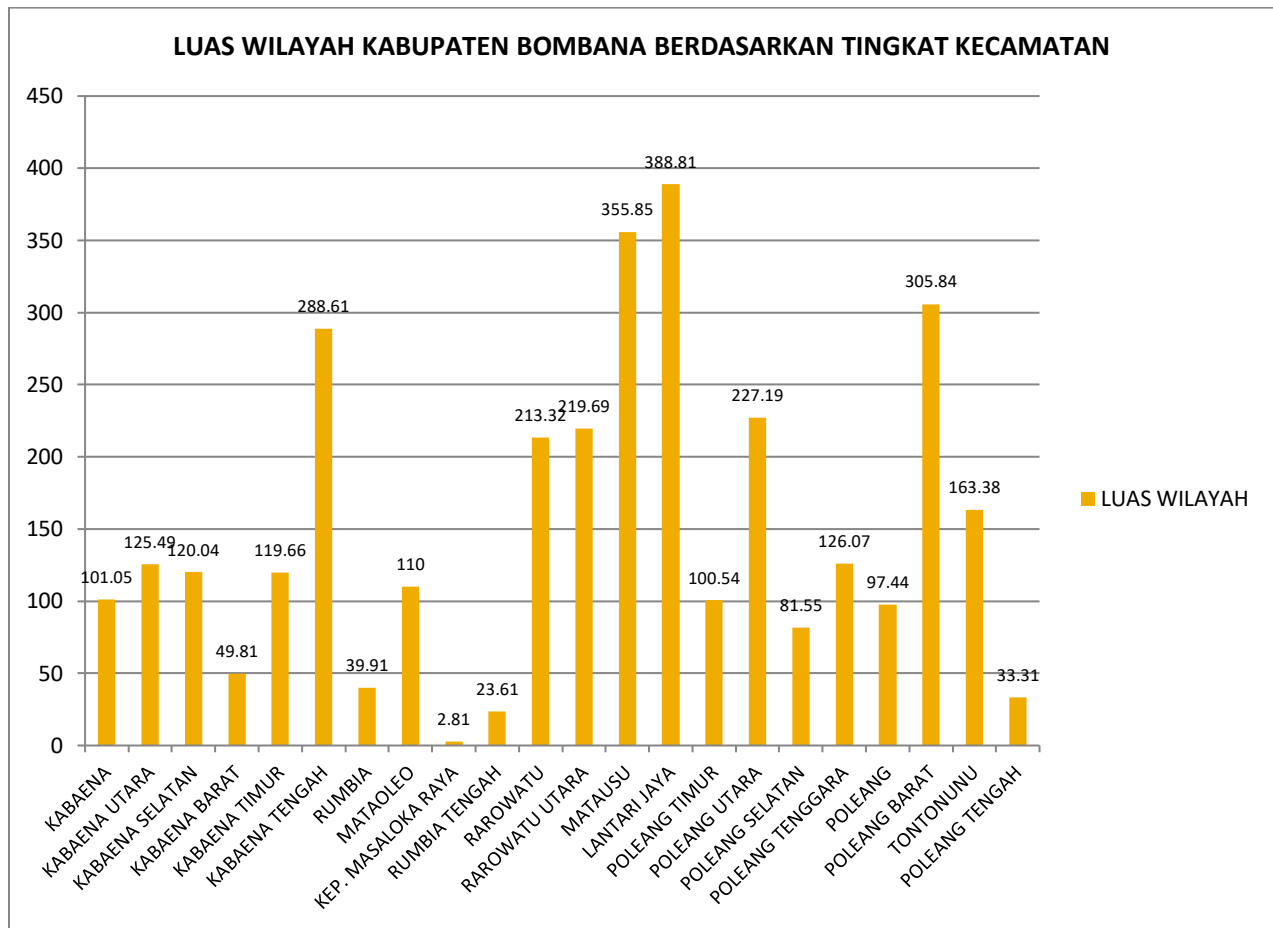
Gambar 2.1

Gambar Peta wilayah Kabupaten Bombana

2.2 Luas Wilayah Kabupaten Bombana

Kabupaten Bombana terbagi dalam 22 (dua puluh dua) wilayah kecamatan, berdasarkan data BPS, Bombana dalam angka tahun 2025.

Luas wilayah menurut kecamatan sangat beragam terlihat pada Grafik dibawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten Bombana 2025

Luas wilayah menurut kecamatan sangat beragam. Kecamatan Lantari Jaya merupakan Kecamatan yang paling luas (388.81 km²), selanjutnya Kecamatan Matausu luas wilayah 355.85 km², selanjutnya Kecamatan Poleang Barat dengan luas wilayah 305.84 km². Adapun luas wilayah terendah pada Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya dengan luas wilayah 2.81 km² dan Kecamatan Rumbia Tengah dengan luas wilayah 23.61 km².

BAB III

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

3.1 Kependudukan

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

Penduduk dalam pembangunan berperan sebagai objek dan sekaligus subjek. Sebagai objek, penduduk merupakan sasaran pembangunan, dan sebagai subjek, penduduk merupakan pelaku pembangunan. Suatu wilayah yang memiliki jumlah penduduk besar berarti memiliki aset potensial yang berguna dalam mendukung proses pembangunan.

Jumlah penduduk yang banyak mengindikasikan bahwa tersedianya angkatan kerja yang banyak dan bila didukung dengan kualitas sumber daya yang memadai tentunya akan memberikan pengaruh besar dalam proses percepatan pembangunan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas penduduk sangat penting dilakukan untuk dapat mendukung jalannya pembangunan yang maksimal.

Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang menempatkan isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan disuatu wilayah. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan terencana disegala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.

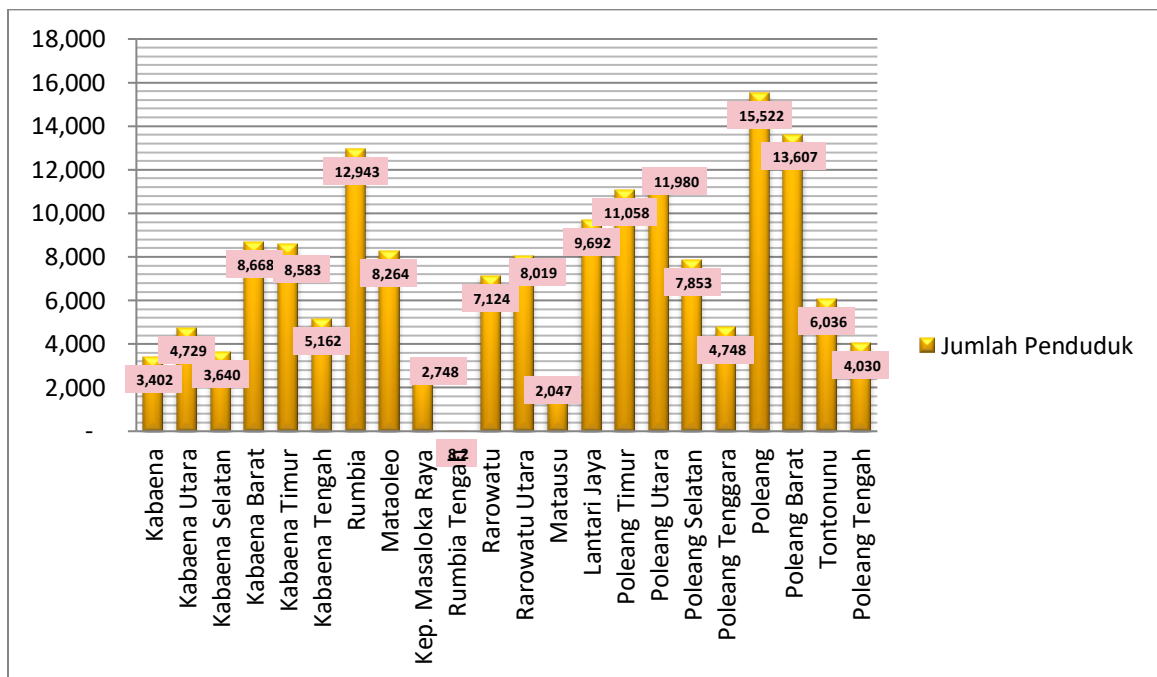
Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan antara Jumlah penduduk laki-laki dengan Jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan Jumlah penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan,

Struktur Umur, Jenis Kelamin dan Rumah Tangga : Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi.

Berdasarkan data Bombana dalam Angka, Jumlah Penduduk Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2024 di Proyeksikan mencapai 168.055 Jiwa dan didominasi oleh laki-laki, dengan data jumlah Perempuan sebanyak 83.187 Jiwa dan Data Laki-laki sebanyak 84.868 jiwa.

Struktur Penduduk Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

Tabel 3.1.1
Grafik Jumlah Penduduk menurut Kecamatan se- Kabupaten Bombana
Tahun 2024



Sumber : Kabupaten Bombana Dalam Angka 2025

Berdasarkan Proyeksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana diatas, Penduduk Kabupaten Bombana Tahun 2024 mencapai 168.055 jiwa. Persebaran penduduk paling besar berada di Kecamatan Poleang sebanyak 15.522 jiwa dan jumlah Penduduk paling rendah berada di Kecamatan Matausu sebesar 2.047 jiwa.

Struktur Penduduk Kabupaten Bombana berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin, 2024

No	Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-4	6.487	6.016	12.503
2	5-9	8.532	8.087	16.619
3	10-14	8.674	8.282	16.956
4	15-19	7.866	7.698	15.564
5	20-24	7.491	7.606	15.097
6	25-29	6.864	6.506	13.370
7	30-34	5.986	6.006	11.992
8	35-39	6.450	6.497	12.947
9	40-44	6.433	6.260	12.693
10	45-49	5.262	5.332	10.594
11	50-54	4.953	4.755	9.708
12	55-59	3.577	3.441	7.018
13	60-64	2.380	2.437	4.817
14	65-69	1.540	1.627	3.167
15	70-74	1.087	1.142	2.229
16	75+	1.286	1.495	2.781
Kabupaten Bombana		84.868	83.187	168.055

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana yang dirangkum pada Bombana dalam Angka Tahun 2025 menunjukkan penduduk Kabupaten Bombana didominasi oleh usia muda yakni pada rentang usia 5-24 Tahun. Dari 163.366 jiwa penduduk Kabupaten Bombana didominasi oleh Penduduk usia 10-14 Tahun sebanyak 16.738 jiwa yang terdiri dari 8.524 jiwa penduduk laki-laki dan 8.214 jiwa penduduk perempuan, Sedangkan Penduduk dengan capaian terendah pada rentang usia 70-74 tahun yakni sebanyak 2.229 jiwa dengan sebaran 1.087 jiwa penduduk laki-laki dan 1.142 jiwa penduduk perempuan.

Memperhatikan data pada Tabel 3.1.2 diatas, dapat dijelaskan Angka ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin rendah angka dependency ratio maka peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi. Rendahnya angka ketergantungan menunjukkan tingginya proporsi penduduk usia produktif relatif terhadap penduduk usia belum/tidak produktif. Sehingga secara ekonomi akan semakin besar peluang untuk menghasilkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin rendahnya dependency ratio juga menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi sehingga nilai tambah perkapita akan semakin tinggi, hal ini berarti peningkatan kesejahteraan penduduk.

Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, pada usia muda angka ketergantungan penduduk laki-laki lebih besar dari pada perempuan, sedangkan pada usia tua, angka ketergantungan perempuan lebih besar daripada laki-laki. Hal ini berhubungan dengan rasio jenis kelamin, dimana pada usia muda rasio jenis kelamin di atas angka 100 (yaitu laki-laki sedangkan pada usia tua rasio jenis kelamin berada di bawah angka 100). Tingginya angka ketergantungan perempuan pada usia tua akan berdampak pada fasilitas sosial ekonomi yang dibutuhkan pada penduduk usia tua. Jaminan sosial, fasilitas kesehatan, serta fasilitas sosial ekonomi lainnya untuk lansia harus diprioritaskan pada perempuan.

3.2 Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami isteri untuk mendapatkan objek tertentu, yaitu: (1) menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, (2) mendapat Kelahiran yang diinginkan, (3) mengatur interval diantara kehamilan, (4) menentukan jumlah anak dalam keluarga. Hal ini tentu sangat berhubungan dengan upaya setiap keluarga untuk merencanakan jumlah kelahiran anak, dengan melalui beberapa jenis alat kontrasepsi seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya.

Program KB merupakan salah satu upaya untuk menekan terjadinya ledakan penduduk yang lebih besar. Program KB pertama kali dilaksanakan pada masa orde baru. Melalui KB masyarakat diharapkan untuk membatasi jumlah kelahiran anak yakni maksimal dua anak.

Dalam upaya meningkatkan kepedulian peran serta masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk menciptakan keluarga dengan kualitas yang lebih baik dalam berbagai segi kehidupannya.

Visi Program KB secara nasional adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas yakni keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, bertanggungjawab dan harmonis. Salah satu program pokok dalam KB nasional adalah menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia.

Salah satu keuntungan dari program KB adalah aspek ekonomi dan kesehatan. Oleh karena itu, program KB menjadi salah satu program pokok dalam meningkatkan status kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat. Selain itu, Program KB juga

membantu remaja mengambil keputusan untuk memilih kehidupan yang lebih baik dengan merencanakan proses reproduksinya.

Pelaksanaan Program KB saat ini dapat dikatakan bias gender karena pada umumnya target alat kontrasepsi hanya berfokus pada perempuan, sedangkan alat kontrasepsi pada laki-laki kurang atau jarang dipublikasikan. Untuk itu, diharapkan agar pemerintah menggalakan berbagai strategi untuk mendorong penggunaan alat kontrasepsi baik yang digunakan perempuan maupun yang ditujukan buat laki-laki. Promosi alat kontrasepsi dapat mencegah ledakan penduduk. Dimana Indonesia saat ini termasuk salah satu Negara terbesar jumlah penduduknya.

Berikut ini akan disajikan tabulasi jumlah pasangan usia subur (PUS) dan peserta aktif KB menurut kecamatan dan jenis pengguna KB di Kabupaten Bombana.

Tabel 3.2

Jumlah pasangan usia subur (PUS) dan peserta aktif KB menurut kecamatan dan jenis pengguna KB di Kabupaten Bombana.

Kecamatan	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Perempuan					Peserta KB Laki-Laki	
		IUD	MOW	Implan	Suntik	Pil	MOP	Kondom
Kabaena	408	17	9	57	68	246	-	8
Kabaena Utara	642	10	5	66	318	232	1	7
Kabaena Selatan	373	13	8	52	124	172	1	3
Kabaena Barat	951	12	12	100	517	301	-	8
Kabaena Timur	804	6	10	31	313	433	-	9
Kabaena Tengah	571	66	24	93	144	236	1	7
Rumbia	1.205	57	19	119	435	556	2	16
Mataoleo	841	23	13	327	385	85	-	3
Kep. Masaloka	157	6	2	33	64	48	-	4

Raya								
Rumbia Tengah	816	25	7	98	439	216	1	26
Rarowatu	1.046	21	30	190	305	484	-	15
Rarowatu Utara	932	29	31	190	469	203	1	8
Matausu	303	5	3	97	114	84	-	-
Lantari Jaya	1.186	37	26	274	612	216	-	21
Poleang Timur	978	29	19	314	388	199	2	24
Poleang Utara	1.082	36	16	218	430	375	-	6
Poleang Selatan	1.073	22	9	225	634	170	-	11
Poleang Tenggara	619	3	6	172	284	137	-	9
Poleang	2.041	32	32	200	928	780	-	69
Poleang Barat	1.517	42	19	177	1.004	250	-	24
Tontonunu	864	3	1	66	512	275	-	7
Poleang Tengah	594	13	3	93	308	153	-	24
Jumlah	19.003	507	304	3.192	8.795	5.851	9	309

Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka 2025

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami isteri yang saat ini hidup bersama, baik bertempat tinggal resmi ataupun tidak, dimana usia isteri 20 Tahun sampai 45 tahun. Pasangan usia subur batasan usia yang digunakan disini adalah 20-45 tahun. Pasangan usia subur berkisar antara usia 20-45 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Ini dibedakan dengan perempuan usia subur yang berstatus janda atau cerai.

Dari 19.003 pasangan usia subur di Kabupaten Bombana Tahun 2024, hanya 18.967 pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi. Jenis kontrasepsi yang digunakan adalah IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan, dan PIL. Penggunaan jenis Kontrasepsi tersebut masih didominasi penggunaannya oleh perempuan sedangkan laki-laki masih kurang.

Penggunaan jenis kontrasepsi, jenis kontrasepsi suntik adalah jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan yaitu sebanyak 8.795 suntikan dan kontrasepsi PIL sebanyak 5851 pil. Sedangkan jenis kontrasepsi paling sedikit digunakan adalah jenis kontrasepsi MOP Sebanyak 9 orang. Vasektomi/MOP (Metode Operasi Pria) adalah tindakan memotong/ menutup saluran mani (vas deferens) yang menyalurkan sel mani (sperma) keluar dari pusat produksinya di testis.

Data diatas menunjukan bahwa program KB di Kabupaten Bombana masih perlu melakukan sosialisasi, promosi, terutama penggunaan alat kontrasepsi untuk laki-laki. Penggunaan alat kontrasepsi selama ini masih didominasi dengan penggunaan kontrasepsi bagi perempuan. Untuk itu, maka perlu inovasi dan program-program KB ditahun mendatang.

BAB IV

KETENAGAKERJAAN DAN EKONOMI

4.1 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selamadan sesudah masa kerja tenaga kerja. Usaha untuk menciptakan kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran dan sekaligus menampung pertambahan tenaga kerja dan sekaligus menampung pertambahan tenaga kerja merupakan bagian kesatuan dari program pembangunan ekonomi dan social, mempertimbangkan sepenuhnya tujuan-tujuan perluasan kesempatan kerja serta kegiatan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Saat ini, ketenagakerjaan masih menjadi problem nasional yang tak kunjung selesai. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pembukaan kesempatan kerja baru apalagi bagi perempuan, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait ketenagakerjaan.

Perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk turut serta berperan dalam pembangunan dengan tanpa adanya pembedaan dengan laki-laki. Perempuan sebagai salah satu sumber daya manusia (human resources) bagi pembangunan mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan laki-laki. Dewasa ini peranan perempuan dalam kegiatan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional menunjukkan adanya peningkatan. Namun secara umum partisipasi perempuan dalam beberapa sektor kegiatan ekonomi masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Semakin meningkatnya peran perempuan pada kegiatan ekonomi tidak terlepas dari perubahan sosial ekonomi serta perubahan-perubahan normatif yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu isu sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar persoalan tersebut tidak meluas dan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Data dan informasi terkait

ketenagakerjaan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah ini baik untuk penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, pemanfaatan data ketenagakerjaan ini juga sangat berpotensi untuk pembangunan nasional.

Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, dan persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha. Data yang disajikan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2024.

Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan, penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

4.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) dan mempunyai pekerjaan (bekerja) atau sedang mencari pekerjaan (pengangguran terbuka). Penduduk yang bekerja tidak hanya meliputi penduduk yang sedang bekerja, tetapi juga sementara tidak bekerja karena suatu sebab, misalnya pegawai yang sedang cuti, petani yang sedang menunggu panen dan sebagainya. Sedangkan pencari kerja adalah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja seperti diketahui sangat tergantung pada struktur penduduk, sifat demografis serta keadaan sosial ekonomi daerah. Bukan Angkatan kerja, adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumahtangga dan

lainnya (tidak aktif secara ekonomis).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui proporsi penduduk yang aktif bekerja dan atau mencari pekerjaan disuatu daerah. TPAK merupakan proporsi atau rasio antara penduduk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Besarnya TPAK secara langsung dipengaruhi oleh besarnya penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja serta keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Hasil Sakernas tahun 2024 yang dituangkan dalam Kabupaten Bombana dalam Angka Tahun 2025 bahwa jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas dengan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 Jumlah Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di Kabupaten Bombana, 2024

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
I	Angkatan Kerja	51.092	32.360	83.452
	Bekerja	50.497	31.762	82.259
	Pengangguran Terbuka	595	598	1.193
II	Bukan Anggota Kerja	7.547	24.777	32.324
	Sekolah	2.160	3.753	5.913
	Mengurus Rumah Tangga	2.932	19.749	22.681
	Lainnya	2.455	1.275	3.730
	Jumlah	58.639	57.137	115.776

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana 2024

Tabel 4.1.1 diatas menunjukkan adanya perbedaan keterlibatan laki-laki dan perempuan jika dilihat dari status pekerjaan utama. Tingkat Partisipasi perempuan yang bekerja sebesar 31.762 jiwa lebih sedikit dari tingkat partisipasi laki-laki sebanyak 50.497 jiwa. Perempuan masih berperan utama dalam sektor Mengurus rumah tangga dimana 19.749 jiwa perempuan yang focus mengurus rumah tangga dan tidak dibayar. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang terlibat dalam pekerjaan keluarga/mengurus rumah tangga yang dianggap sebagai pekerjaan domestik masih dipersepsikan sebagai wilayah kerja perempuan. Factor budaya menempatkan perempuan sebagai pekerja budaya sedangkan laki-laki masih diposisikan sebagai pekerja yang implikasi dengan pendapatan yang harus diterima (berbayar).

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan. Bombana dalam angka Di tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka perempuan lebih besar dibanding pada laki-laki, yakni sebesar 598 jiwa dan pengangguran laki-laki sebanyak 595 jiwa.

4.1.2 Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin

Secara garis besarnya lapangan kerja pekerjaan penduduk Kabupaten Bombana dikelompokkan menjadi enam belas pekerjaan utama yaitu pekerjaan pertanian, Pertambangan dan penggalian, industry pengolahan, listrik, gas dan air minum, konstruksi, perdagangan dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan dan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan social serta jasa lainnya.

Partisipasi perempuan dan laki-laki dapat dilihat dari aspek lapangan pekerjaan utama yang secara lazim dikelompokkan menjadi lapangan kerja utama sebagaimana dalam tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 4.1.2

Jumlah Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin di Kabupaten Bombana Tahun 2024

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Jumlah
	laki-laki	perempuan	
Pertanian	26.064	7.311	33.375
Munafaktur	9.093	3.590	12.683
Jasa	15.340	20.861	36.201
Jumlah	50.497	31.762	82.259

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2024

Peningkatan Pekerja pada sector formal secara langsung akan berdampak pada penurunan jumlah pekerja rentan. Pekerja rentan merupakan pekerja yang bekerja dengan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, menjadi pekerja bebas, atau menjadi pekerja tanpa upah.

Data pada tabel 4.1.2 diatas menunjukkan bahwa secara umum pada lapangan pekerjaan utama, partisipasi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Namun pada lapangan usaha jasa perempuan menempati peran penting dan memiliki keterlibatan yang lebih dominan di banding dengan laki-laki, selain itu, pada sector pertanian dan manufaktur perempuan pun memiliki keterlibatan meskipun tidak seperti keterlibatan laki-laki. Ini merupakan indikator pencapaian yang baik untuk mendorong produktivitas pekerja utama perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga. Namun, karena lebih sulit untuk transisi dari pekerja keluarga ke dunia kerja yang berada diluar

unit keluarga, program-program yang mendukung perempuan untuk membangun keterampilan mereka dan mengakses pekerjaan formal sangat diperlukan.

Melihat adanya kesenjangan pada pekerja rentan mengindasikan bahwa perempuan cenderung bekerja dengan upah yang tidak memadai, produktivitas rendah dan kondisi kerja yang buruk dibandingkan dengan laki-laki besarnya pekerja rentan perempuan ini diperkirakan karena alasan kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Perempuan umumnya akan memilih pekerjaan rumahan atau menjadi pekerja keluarga yang fleksibel aturan jam kerjanya agar dapat tetap mengurus rumah tangga.

Meskipun pada lapangan pekerjaan pertanian untuk laki-laki dan perempuan mengalami penurunan, perbedaan ini secara langsung memperlihatkan ada kesenjangan. Perempuan memang berpartisipasi sebagai pekerja bebas karena lebih banyak tergolong sebagai pekerja keluarga, akan tetapi sebagai pekerja bebas di pertanian perempuan kerap mengalami marginalisasi yaitu proses penyingkiran perempuan dalam pekerjaan. Pada lapangan pekerjaan pertanian, pekerja bebas perempuan tersingkir karena pekerjaan dominan mereka seperti pemilahan benih, menanam, menyangi, membuat pupuk alami, dan memanen mulai digantikan oleh teknologi. Hal ini tentu mengurangi pangsa pasar pekerjaan perempuan pada sector pertanian terutama bagi mereka yang berketerampilan rendah. Mereka bisa beralih ke pekerjaan sector formal, informal lainnya atau bahkan menjadi pengangguran.

4.1.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang bekerja seminggu yang lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bombana, 2024

Berdasarkan status pekerjaan utama, sebagian besar penduduk Kabupaten Bombana Tahun 2024 yang bekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai baik laki laki (15.506 Jiwa) maupun perempuan (9.469 Jiwa). Jumlah kedua terbesar yakni penduduk

yang bekerja dengan status berusaha sendiri dengan jumlah masing- masing 15.715 bagi laki laki dan 8.069 bagi perempuan.

Persentase penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar lebih banyak terdapat pada laki laki (1.571 jiwa) dibanding perempuan (464 jiwa). Sedangkan Pekerja Keluarga /tak dibayar di Dominasi oleh Perempuan sebanyak 8.364 jiwa dan Laki laki sebanyak 6.615 jiwa, Sementara status pekerja bebas lebih banyak ada pada penduduk laki-laki yakni 1.386 jiwa dibanding perempuan yang hanya 406 jiwa.

Tabel 4.1.3

Jumlah Penduduk berumur 15 yang bekerja seminggu yang lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bombana Tahun 2024

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	laki-laki	perempuan	
Berusaha Sendiri	15.715	8.069	23.784
Berusaha di bantu buruh tidak tetap	9.704	4.990	14.694
Berusaha di bantu buruh tetap	1.571	464	2.035
Buruh/Karyawan/Pegawai	15.506	9.469	24.975
Pekerja Bebas	1.386	406	1.792
Pekerja Keluarga/Tak dibayar	6.615	8.364	14.979
Jumlah	50.497	31.762	82.259

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana 2024

4.1.4 Pencari Kerja menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan merupakan indikator utama kualitas sumber daya manusia yang dapat menjembatani kesenjangan peluang dan kesempatan memperoleh pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, maka lebih menonjol sikap intelektual dan kemampuan daya saingnya (*advanced competitive*) lebih terbuka. Pendidikan idelanya bertujuan untuk mendapatkan ilmu yang dapat diterapkan dalam bidang perkerjaan dimasa depan. Namun, kondisi yang terjadi sekarang banyak penduduk usia kerja yang telah menempuh pendidikan tetapi tidak mendapat pekerjaan. Fenomena ini muncul karena saat ini muncul karena saat ini pertumbuhan antara tamatan sekolah dan lapangan pekerjaan untuk penduduk usia kerja tidak sama. Hal ini tentu akan menyulitkan bagi kaum rentan seperti perempuan untuk dapat kesempatan sama seperti laki-laki di lingkungan social apabila mereka tidak mempunyai modal untuk menghadapi persoalan tersebut.

Peran Pendidikan sangat penting sebagai katalisator kemajuan teknologi suatu Negara dan factor penentu kesuksesan daerah dalam bersaing dipasar dunia. Pertumbuhan penduduk usia kerja yang meningkat merupakan bonus demografi untuk daerah dalam meningkatkan produksi. Pemanfaatan bonus ini perlu didukung oleh kesetaraan gender dapat dilakukan melalui akses yang sama terhadap pendidikan. Akses yang sama dan mudah ke pendidikan akan berdampak pada diperolehnya kemampuan yang sama sehingga membuka kesempatan dan akses yang sama pada sumber daya. Disamping itu data pendidikan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan dalam membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jumlah tamatan pendidikan.

Jumlah Pencari Kerja menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bombana Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1.4 dibawah ini:

Tabel 4.1.4

Jumlah Pencari Kerja menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bombana
Tahun 2024

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	laki-laki	perempuan	
Tidak/ Belum Tamat SD	—	—	—
Sekolah Dasar	2	—	2
Sekolah Menengah Pertama	28	—	28
SMA/SMK	450	77	527
Diploma I,II	2	1	3
Diploma III	9	2	11
Universitas	77	52	129
Jumlah	568	132	700

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana 2024

Pada Tabel 4.1.4 diatas menjelaskan bahwa jumlah pencari kerja di Kabupaten Bombana Tahun 2024 didominasi oleh laki-laki. Pencari kerja laki-laki yang paling banyak yaitu pada tingkat Pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 450 jiwa sedangkan pada perempuan sebanyak 77 jiwa. Jumlah Pencari Kerja pada tingkat pendidikan Universitas didominasi oleh laki-laki sebanyak 77 jiwa dan perempuan sebanyak 52 jiwa, untuk Pencari kerja perempuan dengan tingkat pendidikan SD dan SMP/ sederajat nihil dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 28 jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama.

Isu Gender dalam kondisi pasar tenaga kerja tidak pernah lepas dari perhatian. Diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja masih terlihat dalam beberapa aspek. Semangat wanita untuk masuk kedalam pasar tenaga kerja tidak akan

mampu mengangkat kesejahteraan mereka jika kebanyakan dari mereka adalah pekerja informal dan pekerja rentan. Namun kenyataan tersebut yang harus diterima pekerja perempuan. Pekerja perempuan cenderung menjadi pekerja informal dan pekerja rentan yang identic dengan upah rendah dan tidak mendapatkan perlindungan social.

Garis besar yang dapat ditarik dari fakta-fakta pada uraian diatas adalah capaian kesetaraan gender di Indonesia dari aspek pekerjaan mengalami pertumbuhan yang lambat. Usaha untuk mempercepat pertumbuhan diperlukan guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Fakta yang ada menyatakan pekerjaan perempuan masih dominan pada sector informal yang tidak menjanjikan jaminan akan kestabilan bekerja, upah rendah dan sulit untuk pengembangan karir dimasa depan.

Pemerintah dapat terus menyusun strategi untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan praktek diskriminasi gender didunia kerja dengan membuat kebijakan dan Perundnag-undangan yang melindungi perempuan. Selain itu, pemerintah juga terus mendukung berbagai konvensi internasional yang menghapuskan bias gender dalam pasar tenaga kerja. Kemudian, bagi para pengusaha harus memberikan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan untuk mendapatkan pekerjaan, jabatan, promosi dan pelatihan. Kaum perempuan dengan modal manusiawi dan tingkat pendidikan yang sama berhak untuk mendapatkan promosi jabatan yang sama dengan laki-laki. Kaum perempuan mampu memiliki produktivitas yang sama, juga berhak untuk mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki.

4.2 EKONOMI

4.2.1 Partisipasi Perempuan dalam Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi terdiri dari beberapa jenis tergantung kepada tujuan koperasi atau latar

belakang koperasi, misalnya Koperasi Pegawai Negeri Sipil, atau Koperasi Simpan Pinjam yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan simpan pinjam kepada anggotanya, dan lain sebagainya. Kabupaten Bombana memiliki 303 koperasi pada 12 kecamatan. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.1

Jumlah Koperasi Aktif , Koperasi Tidak Aktif di Kabupaten Bombana dan Anggota Koperasi menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bombana Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi			Anggota Koperasi		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kabaena	2	10	12	10	12	22
2	Kabaena Utara	2	6	8	61	46	107
3	Kabaena Selatan	-	6	6	32	29	61
4	Kabaena Barat	5	5	10	27	6	33
5	Kabaena Timur	3	11	14	6	8	14
6	Kabaena Tengah	1	8	9	52	42	94
7	Rumbia	8	50	58	709	733	1442
8	Mataoleo	1	5	6	54	49	103
9	Kep. Masaloka Raya	-	3	3	-	-	-
10	Rumbia Tengah	4	17	21	-	-	-
11	Rarowatu	3	20	23	32	21	53
12	Rarowatu Utara	8	16	24	118	53	171
13	Matausu	-	-	-	-	-	-

14	Lantari Jaya	4	16	20	23	35	58
15	Poleang Timur	5	18	23	-	-	-
16	Poleang Utara	3	12	15	-	-	-
17	Poleang Selatan	2	8	10	30	14	45
18	Poleang Tenggara	1	2	3	16	1	17
19	Poleang	10	13	23	577	318	895
20	Poleang Barat	5	8	13	43	26	69
21	Tontonunu	-	1	1	-	-	-
22	Poleang Tengah	1	-	1	-	-	-
Jumlah		68	235	303	1.790	1.394	3.184

Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM 2024

Dari jumlah koperasi yang ada, telah mampu menyerap tenaga kerja/karyawan yang kondisinya sebagaimana terdapat pada tabel di atas. Dari data di atas dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan untuk ikut sebagai anggota koperasi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan kurang berminat sebagai anggota koperasi, hal ini nantinya diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan kesejahteraan bagi kaum perempuan dan dapat meningkatkan kiprah perempuan dalam masyarakat. Diharapkan ke depan kiprah perempuan untuk ikut berpartisipasi pada koperasi tersebut terus meningkat sehingga perempuan dapat lebih maju dan berdaya.

BAB V

POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

5.1 Politik

Politik merupakan aktivitas untuk mendapatkan, mengembangkan, menggunakan kekuasaan dan sumber-sumber lainnya untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam situasi dimana adanya ketidak pastian atau adanya ketidaksepakatan tentang suatu pilihan. Untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan keinginan individu atau sub unit seringkali harus terlibat dalam perilaku politik untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruhnya.

Untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam politik sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislative. Selain itu, isu keterwakilan menjadi hal penting yang tercantum dalam agenda kedua sub agenda ketiga yaitu "Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan"

Keterlibatan perempuan dalam politik, merupakan sebuah keharusan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan secara politis. Dikhawatirkan rendahnya keterlibatan perempuan dipartai politik dan perlemen, berdampak langsung pada kecilnya alokasi perhatian terhadap pembangunan kesejahteraan perempuan, karena kebijakan –kebijakan dibuat tidak berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan perempuan, sehingga perempuan hanya diposisikan sebagai objek pembangunan dimana hak-hak dan kebutuhan kesejahteraannya terabaikan. Akhirnya yang terjadi adalah perempuan selalu berada pada posisi yang marginal hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator diantaranya dilihat dari sistem pengupahan, upah perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, jaminan kesehatan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, kebijakan-kebijakan moralitas lebih berpihak pada laki-laki dan sebagainya.

Minimnya keterlibatan dan partisipasi politik perempuan menjadi penyumbang terhadap termarginalnya perempuan dalam pembangunan.

5.1.1 Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keterimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud kebijakan berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Partai politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan, partai politik di Indonesia juga merupakan jenjang untuk seseorang menjadi anggota perlemen. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa partai politik harus memenuhi 30 persen bagi perempuan dalam partai politik terutama di lembaga perwakilan rakyat. Dengan dibentuknya UU tersebut seharusnya perempuan Indonesia khususnya di Kabupaten Bombana bisa memanfaatkan peluang untuk lebih berkiprah lagi dalam bidang politik. Berikut dapat dilihat komposisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menurut partai politik dan jenis kelamin, 2024

Tabel 5.1.1

Komposisi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menurut partai politik dan jenis kelamin Tahun 2024

Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	laki-laki	perempuan	
Nasdem	4	—	4
PAN	3	—	3
PKB	4	—	4
Gerindra	3	1	4
PDI-P	3	1	4
Golkar	2	—	2
PBB	2	—	2
PKS	2	—	2
Jumlah	23	2	25

Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel 5.1.1 di atas dapat dilihat bahwa dari 25 orang anggota DPRD Kabupaten Bombana, ada 2 orang perempuan yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni berasal dari partai PDIP dan Partai Gerindra. Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria di dunia politik menjadi salah satu factor penyebab minimnya keterlibatan perempuan. Disamping itu, budaya masyarakat setempat masih mempercayakan kepada laki-laki untuk memimpin.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan keterlibatan perempuan dalam partai politik dan pengambilan keputusan adalah sekurang-kurangnya 30 persen. Jika

berdasarkan pada tabel 5.1.1 diatas, dimana 25 orang anggota DPRD Kabupaten Bombana tahun 2024, hanya terdapat 2 orang perempuan, artinya bahwa keterwakilan perempuan hanya 8 persen sehingga dapat dikatakan bahwa kesenjangan gender dalam politik masing sering terjadi. Tentu ini harus menjadi perhatian bagi partai dalam mengusung kader perempuannya pada pemilihan umum berikutnya

Selanjutnya Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Bombana menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 5.1.1.1

Komposisi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menurut Pendidikan dan jenis kelamin Tahun 2024

Partai Politik	SMA Kebawah	Akademi (I,II,III)	Sarjana (S1)	Magister (S-2), Doktor (s-3)	Jumlah
Nasdem	1	-	1	2	4
PAN	-	1	2	-	3
PKB	-	1	2	1	4
Gerindra	2	-	2	-	4
PDI-P	1	-	1	2	4
Golkar	2	-	-	-	2
PBB	-	-	2	-	2
PKS	1	-	1	-	2
Jumlah	7	2	11	5	25

Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka 2025

Pada Tabel 5.1.1.1 diatas menunjukkan bahwa dari terdapat 7 orang anggota DPRD dengan tingkat Pendidikan SMA, 2 orang dengan tingkat pendidikan DI/DII/DIII, 11 orang Pendidikan Sarjana dan 5 orang dengan tingkat Pendidikan Magister.

5.1.2 Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu urat nadi dalam organisasi pemerintahan, karena PNS sebagai penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, jumlah PNS yang tersedia secara lengkap dan profesional merupakan salah satu hal yang sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berkualitas dan baik. PNS juga berperan sebagai pelayan dari pada masyarakat, oleh karena itu jumlahnya juga sangat menentukan kualitas layanan. Keterlibatan perempuan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dalam pengambilan keputusan di tingkat perangkat daerah menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis kelamin dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 5.1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Bombana berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Tingkatan Pendidikan	Jenis Kelamin ASN		Jumlah
	laki-laki	perempuan	
Sekolah Dasar (SD)	—	—	—
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	—	2
Sekolah Menengah Atas (SMA)	148	107	255
Diploma I	1	2	3
Diploma II	12	20	32
Diploma III	94	348	442
Diploma IV	20	97	117
Sarjana (S1)	1.214	1.879	3.093

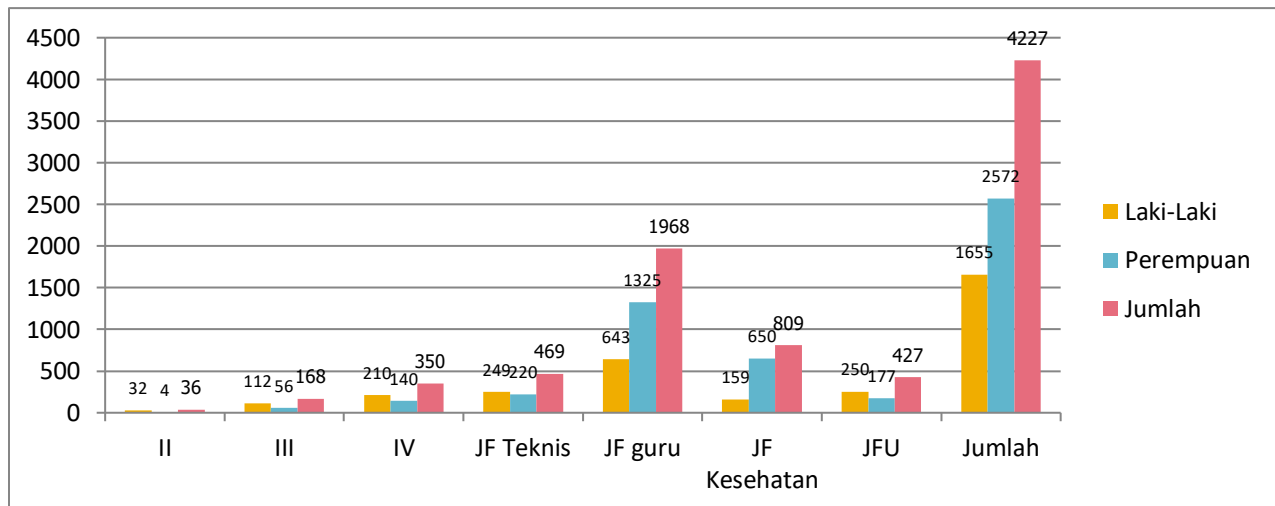
PascaSarjana (S2)	163	118	281
Doktor (S3)	1	1	2
Jumlah	1.655	2.572	4.227

Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka 2025

Tabel 5.1.2 diatas menunjukkan bahwa dari 4.227 Pegawai Negeri Sipil, 2.572 Perempuan memiliki Pendidikan terbanyak, pada tingkatan Pendidikan Sarjana Perempuan sebanyak 1.879, dibandingkan laki-laki sebanyak 955 orang, sedangkan Pendidikan terendah perempuan pada tingkat pendidikan SMA sebanyak 107 orang dan laki-laki pada tingkat pendidikan Diploma II sebanyak 12 orang.

Gambar 5.1.2.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut jenis kelamin dan Eselon tahun 2024



Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka 2025

Pada Gambar 5.1.2. diatas dapat dilihat bahwa perempuan dalam pemerintahan pada level pengambilan keputusan sudah dimulai diperhitungkan. Misalnya keterlibatan perempuan dalam jabatan eselon IV, meskipun masih didominasi oleh PNS laki-laki

namun keterlibatan perempuan menunjukkan angka yang positif yaitu 140 Eselon IV dan laki-laki sebanyak 210 orang.

Demikian pula pada Eselon II dan III, meskipun masih didominasi oleh laki-laki, namun keterlibatan perempuan sudah tidak disampingkan lagi. Tahun 2024, Bupati Bombana menempatkan perempuan pada Eselon III sebanyak 56 orang dan eselon II sebanyak 4 orang dengan eselon II.b.

Dengan memperhatikan sebaran PNS di Kabupaten Bombana berdasarkan golongan, perempuan lebih mendominasi golongan yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS laki-laki. pada gambar berikut dapat dilihat jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan golongan dan jenis kelamin.

Tabel 5.1.2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bombana Tahun 2024

No	Tingkatan Pendidikan	Jenis Kelamin ASN		Jumlah
		laki-laki	perempuan	
I	Golongan I	—	—	—
	I/a (Juru Muda)	—	—	—
	I/b (Juru Muda Tk.I)	—	—	—
	I/c (Juru)	—	—	—
	I/d (Juru Tk.I)	—	—	—
II	Golongan II	95	83	178
	II/a (Pengatur Muda)	4	2	6
	II/b (Pengatur Muda Tk.I)	13	10	23
	II/c (Pengatur)	26	21	47

	II/d (Pengatur Tk.I)	52	50	102
III	Golongan III	838	1.068	1.906
	III/a (Penata Muda)	99	153	252
	III/b (Penata Muda Tk.I)	163	188	351
	III/c (Penata)	280	319	599
	III/d (Penata Tk.I)	296	408	704
IV	Golongan IV	393	355	748
	IV/a (Pembina Muda)	188	210	398
	IV/b (Pembina Muda Tk.I)	178	140	318
	IV/c (Pembina Utama Muda)	26	5	31
	IV/d (Pembina Utama Madya)	1	—	1
	IV/e (Pembina Utama)	—	—	—
	Jumlah	1.326	1.506	2.832

Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka 2025

Tabel 5.1.2.2

Jumlah Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bombana Tahun 2024

Pangkat/Golongan/Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
I	—	—	—

II	—	—	—
III	—	—	—
IV	—	—	—
V	15	14	29
VI	—	—	—
VII	45	174	219
VIII	—	—	—
IX	255	830	1.085
X	14	48	62
XI	—	—	—
XII	—	—	—
XIII	—	—	—
XIV	—	—	—
XV	—	—	—
XVI	—	—	—
XVII	—	—	—
Jumlah	329	1.066	1.395

Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka 2025

Tabel 5.1.2.1 dan 5.1.2.2 di atas menunjukkan sebaran pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Bombana berdasarkan kepangkatan dan golongan antara laki-laki dan perempuan masih didominasi oleh PNS perempuan. Namun pada PNS Golongan IV/b dan IV/c di dominasi oleh PNS laki-laki yaitu 204 PNS laki-laki dan 145 Orang PNS Perempuan.

Profesionalitas tenaga kerja perempuan di Kabupaten Bombana semakin terlihat dari banyaknya keterlibatan perempuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tercermin dari jumlah tenaga kerja perempuan sebagai tenaga manajer maupun tenaga profesional yang bekerja di setiap instansi di pemerintahan Kabupaten Bombana. Berikut ini dapat dilihat jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Bombana.

Tabel 5.1.2.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024

Instansi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sekretariat Daerah	50	37	87
Sekretariat DPRD	27	14	41
Inspektorat	33	21	54
Dinas Lingkungan Hidup	14	8	22
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	4	16
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	13	15	28
Dinas PU dan Penataan Ruang	48	15	63
Dinas Kesehatan	19	68	87
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17	19	36
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	16	38	54
Dinas Perindagkop dan UKM	17	13	30
Dinas Ketahanan Pangan	8	12	20
Dinas Perhubungan	30	8	38
Dinas Sosial	10	6	16
Dinas Pertanian	60	31	91
Dinas Perikanan	13	11	24
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	15	32
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	14	24
Dinas Nakertrans	11	9	20
Dinas Perpustakaan	9	13	22
Dinas Kominfo dan Statistik	14	11	25
Dinas PM dan PTSP	10	17	27

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	14	8	22
BAPPEDA	12	11	23
Pelaksana BPBD	12	7	19
BKPSDM	16	11	27
Badan Kesbang dan Politik	11	8	19
BALITBANG	9	5	14
Badan Keuangan Daerah	29	26	55
Satuan Polisi Pamong Praja	37	10	47
Rumah Sakit Umum Daerah	47	117	164
Kecamatan dan Kelurahan	215	114	329
Puskesmas	119	505	624
Pengawas, Tenaga Administrasi, Guru	676	1.351	2.207
Jumlah	1.655	2.572	4.227

Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka 2025

Berdasarkan data pada tabel 5.1.2.3 diatas dapat dilihat bahwa 4.227 PNS yang tersebar dibebberapa lingkungan pemerintah kabupaten bombana, terdapat 2.572 PNS perempuan dan 1.655 PNS laki-laki. Unit organisasi pemerintahan yang paling dominan jumlah pegawainya adalah pengawas, Tenaga Administrasi dan Guru sebanyak 2.207 PNS yang terdiri atas 1.351 PNS perempuan dan 676 PNS laki-laki. Pada dasarnya distribusi PNS disetiap instansi tidak bisa menjadikan jenis kelamin sebagai tolak ukur karena pada masing-masing dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana memiliki Analisis Beban Kerja (ABK) yang berdasarkan pada kebutuhan dan analisis jabatan.

Tabel 5.1.2.4

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Vertikal Bombana berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

Dinas	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
BPS	14	11	25
Badan Pertanahan Nasional	21	5	26

Kantor Kementerian Agama	125	131	256
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Rumbia	3	-	3
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bombana	26	16	42
Pengadilan Agama Rumbia	15	6	21
Jumlah	204	169	373

Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka 2025

Tabel 5.1.2.4 diatas menunjukkan bahwa dari 373 Pegawai Negeri Sipil, 169 Perempuan di banding laki laki sebanyak 204, Jumlah terbanyak Pegawai Perempuan yaitu pada Instansi Kementerian Agama sebanyak 131 orang, dan Pegawai Perempuan yang terendah pada Dinas Pertanahan sebanyak 5 orang.

Ada enam hambatan atau tantangan yang dihadapi perempuan yang menjadi aparatur Sipil Negara (ASN). Enam hambatan tersebut adalah kultur patriarki di lingkungan kerja, peran domestik rumah tangga, stereotip gender, minimnya dukungan lingkungan kerja, motivasi memimpin dan kebijakan yang masih netral.

Salah satu hambatan muncul ketika pola karier PNS yang mengharuskan mereka menjalani mutasi kedaerah sebagai jalur promosi, perempuan sulit dimutasi kedaerah yang jauh karena harus mempertimbangkan anak dan izin suami. Jabatan Eselon tinggi memiliki tuntutan jam kerja yang lebih panjang dan tidak fleksibel sehingga terjadinya hambatan dalam pembagian waktu antara waktu kerja dan keluarga. Alhasil, perempuan lebih memilih keluarga ketimbang karier. Hal seperti ini jarang terjadi pada PNS laki-laki.

Pola kenaikan jabatan ini sebagai hambatan tak kasat mata bagi PNS Perempuan dan tidak terdeteksi oleh regulasi yang berlandaskan sistem merit seperti Undang-

Undang ASN. Kebijakan rekrutmen dan promosi jabatan yang ada pada saat ini mengedepankan meritokasi terhadap realita kesenjangan PNS perempuan dan laki-laki.

BAB VI

KESEHATAN

6.1 Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi mank dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kesehatan menurut *World Health Organization(WHO)* adalah kondisi dinamis meliputi kesehatan jasman, rohani, social dan tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat dan kelamahan. Sementara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental dan spiritual maupun social yang memungkinkan seorang untuk hidup produktif secara social dan ekonomi. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Hal ini secara tegas disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pembangunan ekonomi memiliki hubungan dua arah dengan kesehatan. Kesehatan penduduk mempengaruhi pembangunan ekonomi dan keberlangsungan sistem daerah. Kesehatan merupakan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kesehatan juga menjadi salah satu dimensi yang digencarkan pembangunannya oleh pemerintah. Tingkat kesehatan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan keluarga, yang secara agregat nasional meningkatkan produk domestik bruto.

Morbiditas adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Morbiditas ini dapat menjadi salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk

secara umum. Semakin kecil angka morbiditas berarti semakin baik penanganan keluhan kesehatan di suatu daerah. Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga terganggu aktifitasnya.

Keberhasilan pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh pendekatan, kebijakan, dan strategi yang tepat sasaran, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, maka upaya-upaya pembangunan kesehatan diselenggarakan secara terintegrasi mulai dari perencanaan sampai ke tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program. Dukungan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat dan cepat dapat menentukan pengambilan keputusan kesehatan kedepannya.

6.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan, melahirkan dan fase nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang dikarenakan oleh kehamilan, persalinan dan masa nifasnya. Angka kematian ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh : 1. keadaan sosial ekonomi dan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan; 2. Kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran; 3. Tingkat tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetric.

Kematian ibu dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. indikator ini dipengaruhi status kesehatan. Secara umum pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikan indikator keberhasilan pembangunan sector

kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas, Adapun rincian kematian ibu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.1.1.
Jumlah Kematian Ibu menurut tingkat Kecamatan di Kabupaten Bombana
Tahun 2024

Kecamatan	Ibu Hamil	Ibu bersalin	Masa Nifas	Jumlah
Rumbia	-	-	-	-
Rumbia Tengah	1	-	-	-
Mataoleo	-	-	-	-
Masaloka Raya	-	-	1	-
Rarowatu	-	-	-	-
Rarowatu Utara	-	-	-	-
Iantari Jaya	-	-	-	-
Matausu	-	-	-	-
Poleang Timur	-	-	-	-
Poleang Utara	-	-	-	-
Poleang Tenggara	-	-	-	-
Poleang selatan	-	-	-	-
Tontonunu	-	-	-	-
Poleang Tengah	-	-	-	-
Poleang	-	-	-	-
Poleang Barat	-	-	-	-
Kabaena	-	-	-	-
Kabaena Barat	-	-	-	-
Kabaena Selatan	-	-	-	-
Kabaena Utara	-	-	-	-
Kabaena Timur	-	1	-	-
Kabaena Tengah	-	-	-	-
Jumlah	-	1	1	2

Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka 2025

Berdasarkan Tabel 6.1.1 diatas terlihat, bahwa pada Tahun 2024 angka kematian ibu pada masa nifas dan bersalin terjadi penurunan, menurut data BPS Kematian ibu pada masa nifas sebanyak 1 orang dan kematian ibu karena bersalin 1 orang.

6.1.2 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Ibu mempunyai peran yang sangat penting didalam siklus pertumbuhan dan perkembangan anak, begitu juga dengan ibu hamil. Gangguan kesehatan yang dialami ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kesehatan janin dalam kandungan, bahkan gangguan tersebut jika tidak cepat ditanggulangi akan berlanjut sampai setelah ia lahir, masa belita dan remaja.

Pelayanan antenatal (ANC) pada ibu hamil adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan professional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya, yang mengikuti program pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif. Hasil pencapaian upaya kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4.

Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu hamil disatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan sasaran ibu hamil disatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilan kepada tenaga kesehatan. Cakupan pelayanan antenatal (K1 dan K4), Kurang Energi Kronis (KEK) dan Pemberian Zat Besi di Kabupaten Bombana Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.1.2

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1/K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Pemberian Zat Besi di Kabupaten Bombana Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Ibu Hamil	Melakukan Kunjungan		Kurang Energi Kronis	Pemberian Zat Besi
		K1	K4		
2020	4.847	3.641	3.243	600	3.250
2021	4.024	3.676	3.161	671	3.156
2022	3.249	2.987	2.797	465	2.799
2023	2.937	2.881	2.721	493	2.346
2024	2.656	2.361	2.147	432	2.084

Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka 2025

Dari tabel 6.1.2 diatas terlihat bahwa ibu hamil dikabupaten bombana sudah mendapatkan pelayanan antenatal (K1) pertama kali pada sebanyak 2.361 orang, sedangkan ibu hamil yang mendapatkan layanan Antenatal empat kali (K4) sebanyak 2.147 orang, sedangkan ibu hamil dikabupaten bombana sudah mendapatkan pelayanan Kurang Energi Kronis sebanyak 432 orang dan Pemberian Zat Besi kepada ibu hamil sebanyak 2.084 orang.

BAB VII

PENDIDIKAN

7.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM). Hal ini berarti bahwa melalui program pendidikan kualitas individu dapat ditingkatkan pada akhirnya kualitas suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas sumber bangsa dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Semakin banyak manusia yang berpendidikan, semakin baik pula kualitas suatu bangsa. Investasi dalam bidang pendidikan merupakan syarat untuk pembangunan manusia (UNDP,1966).

Pendidikan adalah hak setiap orang dan pendidikan merupakan proses perubahan yang mendasar serta mempunyai peran yang sangat penting dalam pergerakan pembangunan berkelanjutan (*quality of education SDGs*). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan.

Keberhasilan pembangunan pendidikan bagi perempuan akan mempercepat proses kesetaraan dan keadilan gender, karena perempuan yang terdidik berarti perempuan yang berhasil keluar dari keterbelakangan sehingga akan menjadi kelompok masyarakat yang juga dapat memperjuangkan hak kesetaraannya tersebut. Selain itu perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih baik akan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan cara mendidik anaknya agar lebih baik.

Indikator Pendidikan seperti dilihat dari angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan kelompok usianya. Indikator lain dalam dimensi pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah menghitung

lama tahun sekolah secara rata-rata bagi penduduk yang berumur tahun keatas, berbeda dengan harapan lama sekolah yang dihitung pada penduduk umur 7 tahun keatas. angka ini mengukur kebijakan pendidikan yang telah dilakukan di beberapa periode tahun sebelumnya. Oleh karena itu, indikator ini merupakan ukuran keberhasilan pendidikan jangka panjang.

Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan., hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal dengan beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain : angka partisipasi sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Upaya peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender hanya dapat dicapai jika perempuan dan laki-laki memiliki akses yang baik dan setara pada pendidikan dan sumber informasi lain. Dengan tingkat pendidikan yang baik, orang memiliki tingkat wawasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik, sehingga lebih mampu melihat dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.

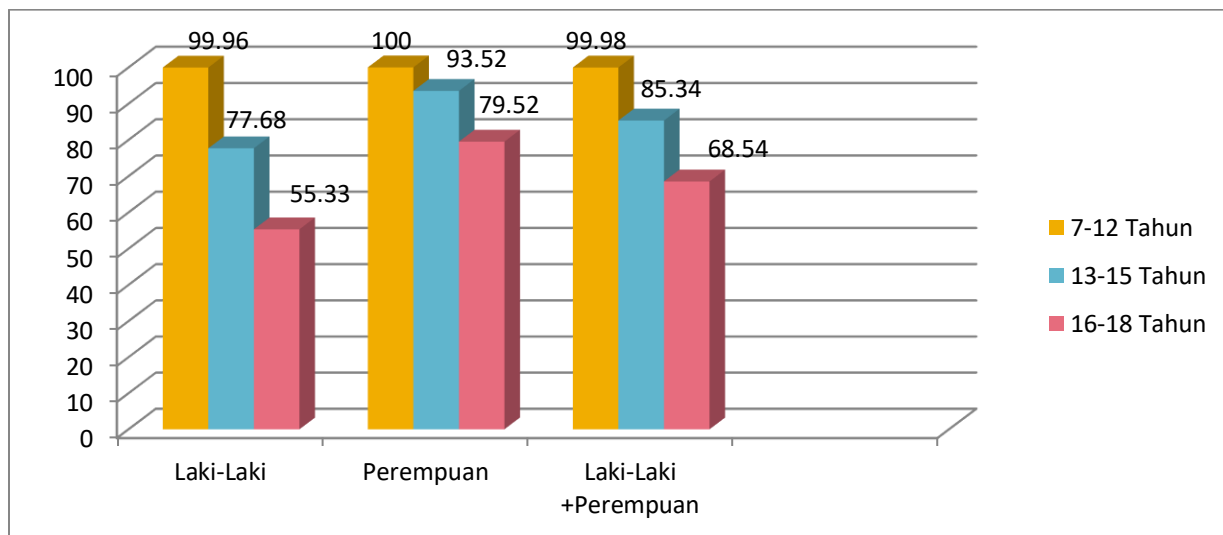
Peningkatan taraf pendidikan dan hilangnya diskriminasi gender dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam pembangunan dan ikut menentukan kebijakan dibidang ekonomi, sosial dan politik. Untuk mendiskripsikan realitas kesetaraan gender dalam bidang pendidikan diperlukan adanya data terpilah berdasarkan kelamin, sehingga dapat diketahui dengan jelas sejauh mana peran, akses, control maupun manfaat yang diterima oleh laki-laki dan perempuan dalam satu wilayah.

7.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Berikut Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk Kabupaten Bombana berdasarkan kelamin dan kelompok umur, 2024

Gambar 7.1.1

Presentase Angka Partisipasi Sekolah di Kabupupaten Bombana Tahun 2024



Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka 2025

Gambar diatas memberikan gambaran tentang Presentase Angka partisipasi sekolah. Jika dilihat dari kelompok umur, penduduk usia 7-12 tahun yang masih sekolah Yaitu 99,98 persen, Penduduk Usia 13-15 Tahun yang masih bersekolah sebanyak 85.34 persen, usia 16-18 tahun sebanyak 68.54 persen.

Gambaran Partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur adalah APS anak usia 7-12 tahun yang berjenis kelamin perempuan lebih tinggi, yaitu sebesar 100 persen dan laki-laki 99.96 persen. APS anak usia 13-15 tahun yang berjenis kelamin perempuan lebih tinggi 93.52 persen dari pada laki-laki 77.68 persen. Adapun APS anak usia 16-18 tahun yang berjenis kelamin perempuan lebih tinggi yaitu sebesar 79,52 persen dibandingkan laki-laki 55.33 persen,. Secara keseluruhan Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun lebih tinggi dari pada usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Artinya dikabupaten Bombana terjadi peningkatan partisipasi anak berdasarkan kelompok usia untuk bersekolah.

7.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar bertujuan menggambarkan keikutsertaan penduduk pada setiap jenjang pendidikan. APK juga sebagai indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk menganyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan. Berikut ini Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk Kabupaten Bombana berdasarkan kelamin dan kelompok umur, 2023

Tabel 7.1.2

Presentase Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk Kabupaten Bombana berdasarkan Jenis kelamin dan Jenjang Pendidikan Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidayah / Sederajat	103.26	103.23	103.25
Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah / Sederaja	66.15	82.05	73.84
Sekolah Menengah Umum/Kejuruan/ Madrasah Aliyah / Sederajat	75.41	93.86	85.49

Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka 2025

Dari Tabel diatas terlihat bahwa APK siswa SD sudah melebihi 100 persen baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah Dasar mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibandingkan usia standar dijenjang pendidikan tertentu menunjukkan kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah, sebaliknya siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk disuatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah diusia yang lebih muda.

7.1.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur, jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan presentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu (7 sampai dengan 18 tahun) yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas

pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usiannya, maka angka partisipasi murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu

Tabel 7.1.3

Presentase Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2024

JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
SD/Madrasah Ibtidayah/Sederajat	99.96	96.53	98.33
SMP/Madrasah Tsanawiyah/Sederajat	56.14	67.66	61.71
SMA/SMK/Sederajat	44,25	71,60	59.19

Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka 2025

Tabel diatas menjelaskan bahwa pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMA sudah dapat diakses secara merata dan tingkat partisipasi juga hampir tidak ada perbedaan. Walaupun dari tabel diatas juga terlihat ada fenomena Angka Partisipasi Murni pada tingkat SD baik laki-laki maupun perempuan lebih tinggi dibanding dengan APM SMP, APM SMA perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki pada tingkat pendidikan. Hal ini menggambarkan bahwa sudah banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai

7.1.4 Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi

Pendidikan adalah interaksi individu dengan anggota masyarakat, yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan dan keterampilan. Pendidikan formal adalah pendidikan yang telah terstandarisasi dalam jenjang kurikulum, materi pembelajaran, evaluasi dan dana yang dikeluarkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Jenjang pendidikan formal

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidayah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat, SMA, Madrasah Aliyah dan SMK yang sederajat. Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.1.4

Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Bombana Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah					Perguruan Tinggi	Jumlah
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK			
1	Kabaena	6	5	1	-	-		
2	Kabaena Utara	8	3	-	1	-		
3	Kabaena Selatan	4	1	-	1	-		
4	Kabaena Barat	14	6	2	1	-		
5	Kabaena Timur	9	3	2	-	-		
6	Kabaena Tengah	9	3	1	1	-		
7	Rumbia	9	3	2	-	-		
8	Mataoleo	9	3	1	-	-		
9	Kep. Masaloka Raya	4	1	1	-	-		
10	Rumbia Tengah	6	2	2	1	1		
11	Rarowatu	8	3	1	-	-		

12	Rarowatu Utara	7	5	2	1	-	
13	Matausu	4	1	1	-	-	
14	Lantari Jaya	9	4	1	-	-	
15	Poleang Timur	11	7	3	2	-	
16	Poleang Utara	12	5	3	-	-	
17	Poleang Selatan	10	4	1	1	-	
18	Poleang Tenggara	5	4	3	-	-	
19	Poleang	13	5	4	1	-	
20	Poleang Barat	16	5	3	-	-	
21	Tontonunu	8	4	2	-	-	
22	Poleang Tengah	4	3	2	-	1	
Jumlah		185	80	38	10	2	

Sumber : Kabupaten Bombana dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa sebaran sarana pendidikan di Kabupaten Bombana cukup banyak. Pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Berangkat dari persepsi masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi bagi mereka dan anak-anaknya sehingga tidak ada batasan gender untuk memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.

Pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana yang dicerminkan dengan jumlah sarana pendidikan dan bantuan pendidikan yang diberikan. Hal itu mendorong masyarakat Kabupaten Bombana dalam meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan.

BAB VIII

KEKERASAN PADA PEREMPUAN

8.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya pada nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Perempuan adalah kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Perlindungan kepada kaum perempuan menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari target yang ingin dicapai dalam SDGs. Pada SDGs isu gender masuk pada tujuan pembangunan ke-5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak. Salah satu targetnya: menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di ruang publik dan swasta termasuk perdagangan manusia, kekerasan seksual dan berbagai macam eksploitasi. Dengan demikian penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan amanah Undang-Undang dan juga menjadi target capaian SDGs. Selain itu, secara sosiologis persoalan kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah sosial yang perlu segera diintervensi. Selain menimbulkan korban dan kerugian yang dialami oleh perempuan. Hal ini juga berdampak pada melemahnya ketahanan keluarga, dan rentannya modal sosial masyarakat.

Perempuan adalah kelompok korban yang rentan menjadi korban kekerasan. Perlindungan kepada kaum perempuan menjadi salah satu tujuan pembangunan

berkelanjutan (TPB). Perempuan adalah kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Perlindungan kepada perempuan menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).

Konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan mencantumkan kekerasan berbasis gender sebagai definisi diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) sebagai kekerasan yang sangat berpengaruh terhadap perempuan. Secara khusus deklarasi PBB Tahun 1993 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan mendefinisikan kekerasan yang meliputi segala tingkah laku merugikan yang ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan karena jenis kelaminnya, termasuk penganiayaan isteri, pemberian gizi yang kurang pada anak perempuan, pelacuran paksa, dan penganiayaan seksual pada anak perempuan.

Berbagai kekerasan berbasis gender adalah istilah yang merujuk pada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan dan dimana biasanya yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat adanya distribusi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Disebut kekerasan berbasis gender karena menunjuk pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat. Dihampir semua kebudayaan, tradisi, norma, dan institusi sosial melegitimasi serta memberi lampu hijau bagi kekerasan terhadap perempuan. Pemakaian istilah kekerasan berbasis gender memberi konteks baru untuk memahami fenomena kekerasan yang sudah ada.

Pada dasarnya bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Namun, gender bukanlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai pemberian tuhan. Gender lebih ditekankan kepada perbedaan peranan dan fungsi yang ada dan dibuat oleh masyarakat. Oleh karena itu, gender penting dipahami dan dianalisa untuk melihat apakah perbedaan tersebut menimbulkan diskriminasi dalam artian perbedaan yang membawa kerugian dan penderitaan terhadap pihak perempuan. Di Kabupaten Bombana banyak hal yang berhubungan dengan gender antara lain kekerasan terhadap

perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, pelecehan seksual dll. Berikut ini Jumlah Kekerasan di Kabupaten Bombana.

Tabel 8.1

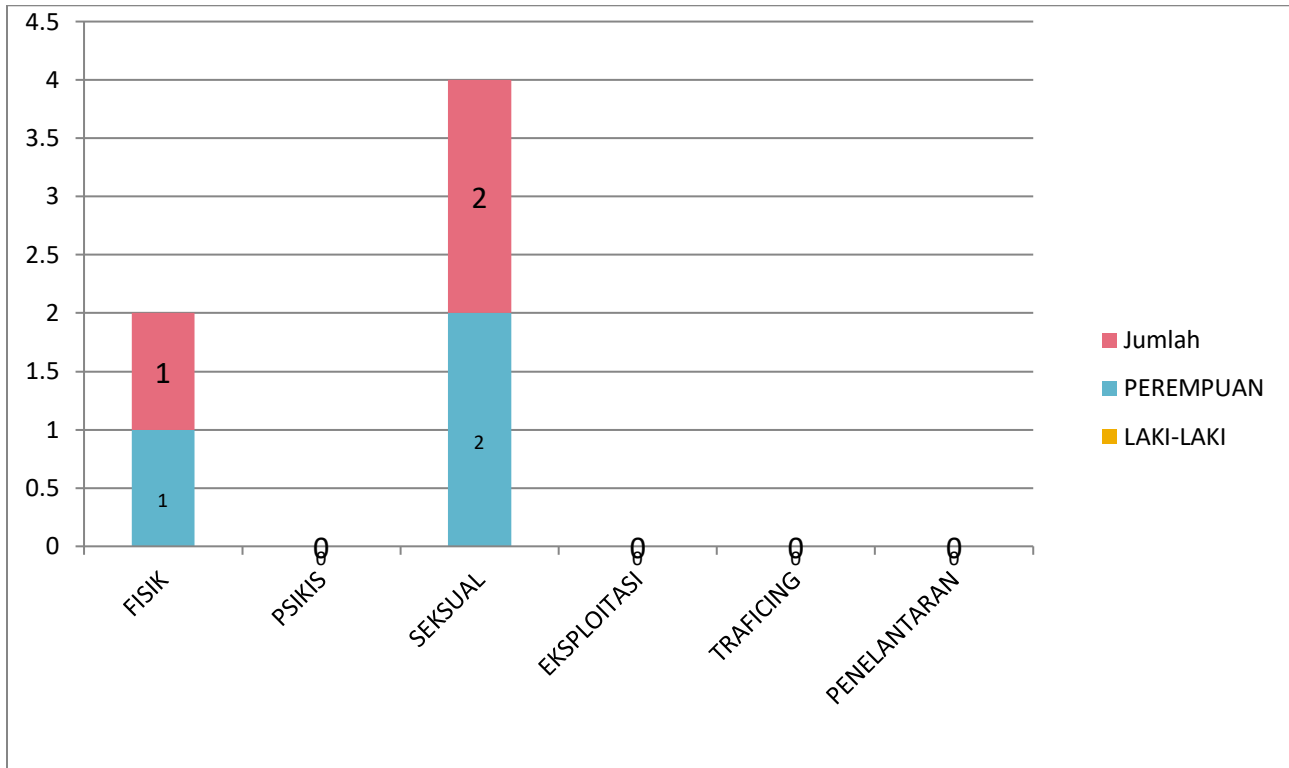
Jumlah Korban Kekerasan pada Perempuan berdasarkan Kasus dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bombana Tahun 2024

Jenis Kasus	Jenis Kelamin		Ket
	Laki-Laki	Perempuan	
Fisik	-	1	KDRT
Psikis	-	-	
Seksual	-	2	Dewasa
Eksploitasi	-	-	
Traficing	-	-	
Penelantaran	-	-	
Lainnya	-	-	
Bombana	-	3	

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024

Berdasarkan Tabel 8.1 diatas menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan pada jenis kasus seksual pada perempuan sebanyak 2 kasus, 1 Kasus terhadap perempuan dewasa pada jenis kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Data ini merupakan rekapitulasi dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bombana.

Gambar 8.1
Jumlah Korban Kekerasan pada Perempuan berdasarkan Kasus dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bombana Tahun 2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024

Kekerasan yang banyak dialami perempuan adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual, hal ini disebabkan oleh :

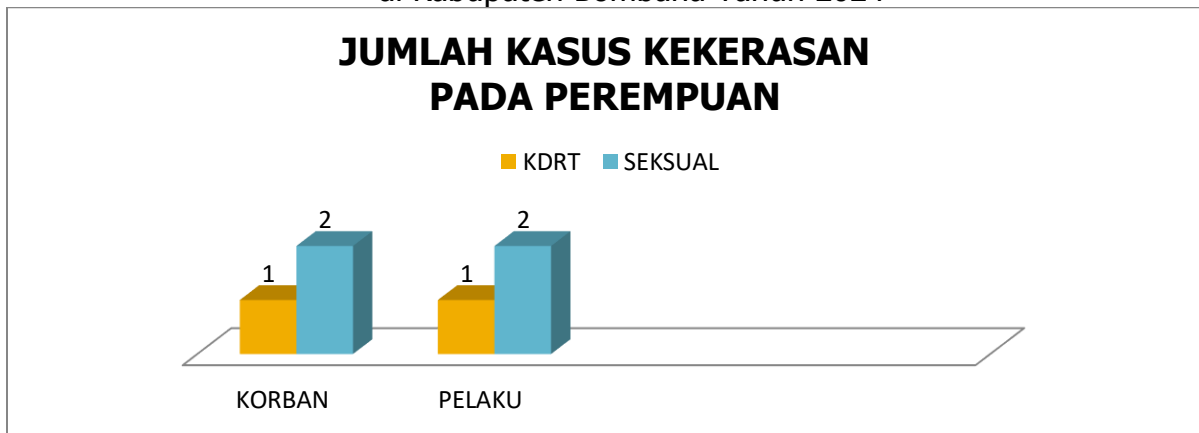
- Media elektronik yang bisa diakses bebas untuk menayangkan tentang kehidupan seksual, kekerasan dan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, bahkan anak-anak di bawah umur.
- Kurangnya ilmu agama
- Akibat pergaulan bebas
- Adanya kesempatan karena tinggal di daerah yang sepi penduduknya dan terpencil.
- Kurangnya pengawasan dari orang tua dan masyarakat

- Banyaknya beredar media pornografi dan pornoaksi.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Kekerasan Seksual pada perempuan menjadi momok yang sangat menakutkan karena bisa berdampak pada psikis korban yang berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang didepan umum atau dalam lingkungan pribadi yang dilakukan oleh anggota keluarga.

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih terjadi dalam berbagai bentuk dan modus yang tidak banyak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi belum didapatkan data yang akurat sesuai dengan yang terjadi dilapangan, karena stigma yang terjadi pada masyarakat adalah rasa malu apabila mengadukan permasalahan kepada orang lain, sehingga kasus kekerasan khususnya yang terjadi dirumah tangga tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang. Korban dan pelaku yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Bombana dilihat pada Gambar dibawah ini:

Gambar 8.2
Jumlah Korban dan Pelaku Kekerasan pada Perempuan berdasarkan Kasus di Kabupaten Bombana Tahun 2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024

Tabel 8.1.1

Jumlah Korban dan pelaku yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Bombana
Tahun 2024

Korban dan Pelaku Kekerasan	
Korban	Jumlah
Perempuan Dewasa	3
Laki-Laki	
Pelaku	
Pelaku Dewasa (laki-laki)	3

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024

Untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak Pemerintah daerah kabupaten bombana membentuk Satgas berdasarkan SK Bupati Bombana Nomor 257 Tahun 2021 tentang pembentukan Satgas Penanganan masalah Perempuan dan Anak tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Satgas terbentuk karena pemerintah daerah merasa perlu hadir, karena kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang menghambat tercapainya kesetaraan, kemajuan dan perdamaian. Dapat dikatakan bahwa kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Baik yang terjadi didepan umum maupun Domestik.

Tabel 8.1.1.2 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian Per Kecamatan di Kabupaten Bombana Tahun 2024

No	Kecamatan	Tempat Kejadian		
		Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1	Rumbia	-	-	-
2	Rumbia Tengah	1	-	-
3	Mataoleo	-	-	-
4	Kep. Masaloka Raya	-	-	-
5	Lantari Jaya	-	-	-
6	Rarowatu	-	-	-
7	Rarowatu Utara	-	-	-
8	Matausu	-	-	-
9	Poleang	1	-	-
10	Poleang Barat	-	-	-
11	Poleang Tengah	-	-	-
12	Poleang Selatan	-	-	-
13	Poleang Timur	-	-	1
14	Poleang Tenggara	-	-	-
15	Poleang Utara	-	-	-
16	Tontonunu	-	-	-
17	Kabaena	-	-	-
18	Kabaena Barat	-	-	-
19	Kabaena Selatan	-	-	-
20	Kabaena Utara	-	-	-
21	Kabaena Tengah	-	-	-
22	Kabaena Timur	-	-	-
	Jumlah	2	-	1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024

Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak kebanyakan terjadi dalam lingkup rumah tangga dibanding tempat-tempat lainnya, apalagi pelaku umumnya adalah orang terdekat korban. Pelaku sangat memahami situasi dan kondisi dalam rumah tangga tersebut dan lingkungannya tanpa terbaca dan tidak diketahui oleh orang lain.

Tabel 8.1.1.3. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Pelayanan yang diberikan Per Kecamatan di Kabupaten Bombana Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis pelayanan yang diberikan				
		Pengaduan	Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan & Bantuan Hukum	Pendampingan
1	Rumbia	-	-	-	-	-
2	Rumbia Tengah	1	-	-	-	-
3	Mataoleo	-	-	-	-	-
4	Kep. Masaloka Raya	-	-	-	-	-
5	Lantari Jaya	-	-	-	-	-
6	Rarowatu	-	-	-	-	-
7	Rarowatu Utara	-	-	-	-	-
8	Matausu	-	-	-	-	-
9	Poleang	1	-	-	-	1
10	Poleang Barat	-	-	-	-	-
11	Poleang Tengah	-	-	-	-	-
12	Poleang Selatan	-	-	-	-	-
13	Poleang Timur	1	-	-	-	1
14	Poleang Tenggara	-	-	-	-	-
15	Poleang Utara	-	-	-	-	-
16	Tontonunu	-	-	-	-	-
17	Kabaena	-	-	-	-	-
18	Kabaena Barat	-	-	-	-	-
19	Kabaena Selatan	-	-	-	-	-
20	Kabaena Utara	-	-	-	-	-
21	Kabaena Tengah	-	-	-	-	-
22	Kabaena Timur	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024

Tabel 8.1.1.4 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan Per Kecamatan di Kabupaten Bombana Tahun 2024

No	Kecamatan	Berusaha sendiri		Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar		Berusaha dibantu buruh tetap		Buruh/ Karyawan/ Pegawai		Pekerja bebas di pertanian		Pekerja bebas di non pertanian		Sekolah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Rumbia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumbia Tengah	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
3	Mataoleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kep. Masaloka Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lantari Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rarowatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Rarowatu Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Matausu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Poleang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
10	Poleang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Poleang Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Poleang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Poleang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
14	Poleang Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Poleang Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tontonunu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kabaena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kabaena Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kabaena Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kabaena Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kabaena Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kabaena Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024

Berdasarkan data Simponi Tahun 2024 Korban Kekerasan menurut tempat kejadian di tingkat kecamatan se Kabupaten Bombana yaitu 1 orang dari Kecamatan Rumbia Tengah dengan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), 1 orang Kasus di kecamatan Poleang dan 1 orang di Kecamatan Poleang Timur.

Dalam Menangani Korban Kekerasan terhadap Perempuan UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana memberikan layanan gratis kepada Korban kekerasan berupa pengaduan dan Pendampingan terhadap korban kekerasan.

BAB IX

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke seluruh proses pembangunan nasional. Profil gender merupakan perwujudan dan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak.

Sebagai salah satu upaya pengelolaan data pembangunan maka data terpilah Gender disusun secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender di kabupaten Bombana.. Profil Gender menyajikan data tentang perbedaan peran maupun keadaan perempuan relative terhadap laki-laki diberbagai bidang. Diharapkan menjadi sumber dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan serta penganggaran yang responsive gender untuk kedepannya.

Berdasarkan data perspektif gender Kabupaten Bombana Tahun 2024, dapat kita lihat masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender. Beberapa isu penting dan untuk lebih di perhatikan adalah :

1. Ketersediaan Data

- a. Menjadikan Data Terpilah sebagai isu strategis untuk di programkan dan dilaksanakan pada masing-masing OPD baik di Tingkat Kabupaten maupun di Tingkat Kecamatan.

- b. Ketersediaan Data Terpisah sangat penting dalam menyelesaikan ketimpangan dan keadilan gender pada semua bidang pembangunan, yang idealnya akan memiliki pendekatan spesifik sesuai kebutuhan.
- c. Meminimalisir panduan format dan deskripsi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis gender pada setiap indikator pembangunan. Hal ini akan sangat membantu komunikasi dan koordinasi data yang bersifat sektoral.

2. Beberapa Isu Menarik Pada Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan

a. Kesehatan

Isu Nasional mengenai partisipasi aktif laki-laki dalam ber-KB sudah ada sejak Tahun 1994, namun sampai saat ini masih belum diperoleh hasil yang signifikan. Sebagai daerah dengan dinamika kehidupan sosial yang relatif stabil, perlu dicari terobosan terbaru yang dapat mengangkat nama Kabupaten Bombana yang mempelopori kampanye peran aktif laki-laki dalam ber-KB meskipun sampai tahun 2024 angka partisipasi KB Pria Aktif mencapai angka 408 yang sangat jauh lebih tinggi dibanding Peserta KB Perempuan aktif sebesar 18.649.

b. Peranan Perempuan di Sektor Publik

Masih perlu dipersiapkan perempuan-perempuan yang berpotensi dan tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis (partisipasi dalam bidang legislatif) sejak dari sekarang. Persiapan itu bisa dalam bentuk pendidikan dan pembekalan terhadap kader-kader dan simpatisan dari partai politik. Sehingga pada pemilu berikutnya kita sudah memiliki caleg- caleg perempuan yang siap bersaing di ranah politik.

c. Kekerasan Terhadap Perempuan

Menarik untuk dilakukan pengkajian terhadap kebijakan/ peraturan yang telah dibuat dan dilaksanakan pada jajaran pemerintahan, apakah berpotensi menimbulkan diskriminasi serta tindakan kekerasan terhadap perempuan karena sampai tahun 2024 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui P2TP2A terus mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi hal ini tidak berarti ada peningkatan kasus KDRT di Kabupaten Bombana. Di sisi lain, hal ini menunjukkan mulai adanya keberanian dari masyarakat terutama perempuan dan anak melaporkan kasus kekerasan yang dialami.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilihat dari buku Profil Gender Kabupaten Bombana Tahun 2024, maka beberapa hal yang dapat dilakukan adalah :

1. Perlu dilakukan koordinasi, kerjasama dan komunikasi yang lebih baik antar lembaga-lembaga yang terlibat dalam program pengarusutamaan gender untuk dapat membuka dan membagi informasi dengan mudah dan efektif.
2. Perlu dilakukan kajian mendalam terhadap peranan dan keterlibatan lembaga-lembaga pengarusutamaan gender dan anak dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan gender di Kabupaten Bombana.

Program penyusunan Buku Data Profil Gender Kabupaten Bombana diperlukan setiap tahun untuk mendorong ketersediaan data gender yang berkuantitas dan berkualitas di semua bidang instansi terkait. Diharapkan data dan informasi gender nantinya merupakan data yang mudah didapat. Dengan disusunnya buku ini secara berkesinambungan juga akan membantu ketersediaan data gender yang lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan dan relevan. Dengan demikian ini akan menjadi bahan rujukan dalam perumusan kebijakan mulai perencanaan, sampai pemantauan dan evaluasi program- program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusas Statisti (BPS) Kabupaten Bombana. 2024. *Bombana Dalam Angka 2025*.

Dinas PPPA, PP, dan KB Kabupaten Pasaman. 2024. Buku Data Profil Gender Kabupaten Pasaman 2024.

BPS Kabupaten Semarang,2023. Profil Gender Kabupaten Semarang 2023.